

LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) SKPD

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2021



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Pemda Pelaihari

Kode Pos : 70814

Telp : (0512) 21863-Fax (0512)21009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)/Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dapat disusun dengan baik.

Adapun tujuan pembuatan LKPJ/LPPD dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, profesional, partisipatif dan akuntabel serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Dengan pembuatan LKPJ/LPPD ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menjalankan prinsip-prinsip good governance.

Kami menyadari laporan ini belum sempurna seperti yang apa diharapkan mengingat keterbatasan dan kemampuan pada kami, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan demi tersusunnya pelaporan yang lebih baik.

Pelaihari, 18 Januari 2022

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT**



LUFFIATI UYUN, M. Pd
NIP. 19620622 198702 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi SKPD	3
1.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD	3
1.1.2 Prioritas SKPD dalam Pencapaian Visi dan Misi Daerah	8
BAB II. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD	11
BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	12
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	12
3.1.1 Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	12
BAB IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	20
BAB V. PENUTUP	21
LAMPIRAN	22

DAFTAR TABEL

		Halaman
1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021	8
2	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	12
3	Realisasi Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021	13

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut disusun dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.2. VISI DAN MISI SKPD

1.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Rencana Strategis Kabupaten Tanah Laut dijabarkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

RPJMD Kabupaten Tanah Laut ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD untuk tahun 2018 sampai dengan 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target selama periode tersebut.

Visi adalah suatu gambaran jauh kedepan, kemana suatu organisasi/lembaga hendak dibawa. Pernyataan Visi Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 adalah :

**“TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS,
AKTUAL, DAN SINERGI
(BERINTERAKSI)”**

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Berkarya

:

Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi ini berupa terobosan jenis pelayanan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

Tertata

Aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

Relegius

Peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

Aktual

Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Sinergi

Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah “**DESA DIBINA, KOTA DITATA**”. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah “**KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS**”.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” melalui “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”. Fokus pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Kondisi yang diharapkan dari pembinaan desa dan penataan kota di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah karya nyata dalam wujud peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan di tingkat perdesaan dan perkotaan.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA : diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti

meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut

- INOVASI : diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
- TERTATA : diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
- RELIGIUS : diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat
- AKTUAL dan SINERGI : diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023, maka visi Sekretariat DPRD adalah *"Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Upaya Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Tanah Laut"*.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana prasarana, kualitas SDM dan kualitas administrasi kepegawaian;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD;
3. Meningkatnya penyelenggaraan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat DPRD;
4. Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mempelancar dan memadukan setiap usaha untuk mencapai Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya maka dituangkan dalam bentuk kebijakan. Dengan demikian maka arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dukungan kualitas Pelayanan dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan sarana prasarana, kualitas SDM dan kualitas administrasi kepegawaian;
2. Meningkatkan dukungan kualitas penyelenggaraan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD;
3. Meningkatkan dukungan penyelenggaraan dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat DPRD;
4. Optimalisasi dukungan fasilitasi dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD.

1.2.2. Prioritas SKPD dalam Pencapaian Visi dan Misi Daerah

Rencana program prioritas SKPD tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2021. Dalam mewujudkan prioritas SKPD, ada 2 program, 17 kegiatan dan 68 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.3.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.4.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
1.5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
1.5.1	Pengadaan Mebel
1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.8	<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>
1.8.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
1.8.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
1.8.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
1.9	<i>Layanan Administrasi DPRD</i>
1.9.1	Fasilitasi Fraksi DPRD
1.9.2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
2	<i>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</i>
2.1	<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>
2.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2.1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
2.1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
2.2	<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>
2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS
2.2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
2.2.3	Pembahasan APBD
2.2.4	Pembahasan APBD Perubahan
2.2.5	Pembahasan Laporan Semester
2.2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
2.3	<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
2.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
2.3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
2.3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
2.3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
2.3.5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
2.3.6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
2.3.7	Pengawasan Penggunaan Anggaran
2.4	<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>
2.4.1	Bimbingan Teknis DPRD
2.4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
2.4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
2.4.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
2.4.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
2.4.6	Penyusunan Program Kerja DPRD
2.5	<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>
2.5.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah
2.5.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
2.5.3	Pelaksanaan Reses
2.6	<i>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>
2.6.1	Pengawasan Kode Etik DPRD
2.7	<i>Pembahasan Kerja Sama Daerah</i>
2.7.1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
2.7.2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
2.8	<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>
2.8.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
2.8.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

BAB II.
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 semula berjumlah Rp. 69.023.411.970 menjadi Rp 69.248.368.264 Ada penambahan sebesar Rp. 224.956.294.- Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. -	
b. Bertambah/berkurang Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. -	Rp. -

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 69.023.411.970	
b. Bertambah/berkurang Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. -	Rp. 69.248.368.264
Surplus/(defisit) setelah perubahan		Rp. (224.956.294)

3. Pembiayaan Daerah
Penerimaan :

a. Semula	Rp. -	
b. Bertambah/berkurang	Rp. -	
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. -

Pengeluaran :

a. Semula	Rp. -	
b. Bertambah/berkurang	Rp. -	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. -

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Sekretariat DPRD pada tahun 2021 mengalokasikan jumlah belanja sebesar Rp.69.248.368.264 sebelum perubahan sebesar Rp 69.023.411.970.-

Selanjutnya pada pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan Realisasi belanja sebesar Rp. 45.174.057.250,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 65,23% dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 24.074.311.014 (34,76%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO.	URAIAN	Pagu	Realisasi	(%)
1.	BELANJA	69.248.368.264	45.174.057.250	65,23
	A. BELANJA OPERASI	67.119.078.965	43.597.629.525	64,96
	- Belanja Pegawai	29.859.650.926	26.552.292.253	88,92
	Belanja Barang	37.259.428.039	17.045.337.272	45,75
	B. BELANJA MODAL	2.129.289.299	1.576.427.725	74,04
	- Belanja Peralatan dan Mesin	1.633.980.299	1.130.661.725	69,20
	- Belanja Bangunan dan Gedung	495.309.000	445.766.000	90,00

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Hal ini bisa dijelaskan dalam capaian IKU SKPD dan analisa capaian Kinerja.

Adapun capaian IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 mencapai nilai 77,70 (Baik) dari target 77,09 (Baik) atau dengan kata lain capaian IKU 2021 mencapai 100,79 % dari target. Untuk Capaian Target Kinerja keseluruhan berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2021 mencapai 89,51% (tinggi) dan capaian realisasi anggaran 65,23% (sedang). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Realisasi Program/kegiatan, Indikator Kinerja Program dan tingkat capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD Tahun 2021

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			36.934.008.543		32.123.450.796		86,98%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun (Dokumen)	100	112.133.700	100	46.257.300	100,00%	41,25%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	40	16.070.540	40	8.525.400	100,00%	53,05%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun*) ()	106	12.116.800	106	4.390.900	100,00%	36,24%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun*) ()	160	39.399.850	160	13.867.400	100,00%	35,20%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun*) ()	60	15.893.110	60	8.475.600	100,00%	53,33%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun*) ()	30	10.842.660	30	2.548.500	100,00%	23,50%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja keuangan SKPD (Dokumen)	40	17.810.740	40	8.449.500	100,00%	47,44%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ()	0	-	-	-	0,00%	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	100	5.896.494.360	101	4.669.055.290	101,11%	79,18%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	12	5.133.989.156	12	4.014.242.350	100,00%	78,19%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu*) (bulan)	336	701.734.574	336	619.970.160	100,00%	88,35%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)	81	19.612.040	90	17.366.600	111,11%	88,55%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun*) (dokumen)	288	26.140.190	288	11.270.530	100,00%	43,12%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*) (dokumen)	20	5.922.600	20	2.379.600	100,00%	40,18%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun*) ()	2	3.890.900	2	1.273.000	100,00%	32,72%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun*) (dokumen)	40	2.803.300	40	1.233.850	100,00%	44,01%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*) (dokumen)	20	2.401.600	20	1.319.200	100,00%	54,93%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Pakaian Dinas (Jenis)	100	181.376.000	94	112.499.377	94,31%	62,03%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*) (stel)	68	29.376.000	68	28.900.000	100,00%	98,38%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*) (orang)	20	152.000.000	15	83.599.377	75,00%	55,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentasi pemenuhan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah (100%)	100	1.580.887.854	98	1.488.827.746	98,07%	94,18%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	11	31.315.570	11	29.535.600	100,00%	94,32%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	20	45.577.444	20	41.657.300	100,00%	91,40%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	12	32.619.840	11	20.373.400	91,67%	62,46%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	12	1.471.375.000	12	1.397.261.446	100,00%	94,96%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentasi pemenuhan pengadaan sarana dan prasarana pendukung SKPD Sekretariat DPRD (100%)	100	1.773.660.219	100	1.253.054.525	100,00%	70,65%
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan*) (unit)	5	301.231.280	5	216.785.000	100,00%	71,97%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan*) (unit)	42	1.472.428.939	42	1.036.269.525	100,00%	70,38%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentasi pemenuhan Jasa Penunjang SKPD Sekretariat DPRD (100%)	100	495.644.870	100	437.014.354	99,98%	88,17%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia*) (bulan)	439	4.390.000	439	4.390.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	12	264.834.200	12	230.332.854	100,00%	86,97%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*) (bulan)	29	27.185.670	29	21.411.500	100,00%	78,76%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	96	199.235.000	96	180.880.000	100,00%	90,79%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100	892.489.600	84	527.984.901	83,56%	59,16%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	12	467.292.400	12	217.844.350	100,00%	46,62%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	12	91.400.000	10	49.576.051	83,33%	54,24%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	12	37.730.000	12	35.786.500	100,00%	94,85%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara*) (unit)	12	34.282.200	6	9.504.000	50,00%	27,72%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara*) (unit)	7	261.785.000	6	215.274.000	85,71%	82,23%
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentasi pemenuhan Hak Administrasi dan Keuangan Anggota DPRD (100%)	100	25.307.381.770	1.600	22.972.026.103	1599,83%	90,77%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan DPRD (Tahun)	12	24.725.661.770	12	22.538.049.903	100,00%	91,15%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Atribut Pakaian Dinas untuk DPRD dan Sekwan , Tersedianya Pakaian Batik Tradisional untuk DPRD, Tersedianya PDH untuk DPRD dan Sekwan, Tersedianya PSH untuk DPRD, Tersedianya PSL untuk DPRD dan Sekwan , Tersedianya PSR untuk DPRD dan Sekwan (Jenis dan Stel)	184	511.720.000	184	388.438.000	100,00%	75,91%
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check UP DPRD (Orang)	35	70.000.000	35	45.538.200	100,00%	65,05%
Layanan Administrasi DPRD	Prosentasi pemenuhan Terasilinasinya kegiatan fraksi dan kegiatan rapat DPRD (100%)	100	693.940.170	466	616.731.200	465,50%	88,87%
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Peserta Rapat (Orang)	1224	29.664.570	1.224	8.018.000	100,00%	27,03%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Rapat Koordinasi (Kali)	255	664.275.600	336	608.713.200	131,76%	91,64%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			32.314.359.721		13.050.606.454		40,39%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentasi pemenuhan Terasilitasinya Proses dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD untuk Kemajuan Daerah (100%)	100	8.498.837.751	83	2.617.139.756	83,32%	30,79%
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terasilitasinya Penerbitan Surat Pertimbangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Tahun)	12	967.694.550	12	463.233.593	100,00%	47,87%
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah (Raperda)	19	6.732.659.090	4	1.882.728.913	21,05%	27,96%
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terbayarnya Tenaga Ahli Kajian Perundang Undangan (Tahun)	12	21.099.850	12	18.848.150	100,00%	89,33%
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	erpenuhnya Syarat Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD (Tahun)	5	777.384.261	-	252.329.100	0,00%	32,46%
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentasi pemenuhan Terasilitasinya Proses dan Mekanisme Pembahasan Kebijakan Anggaran sampai dengan Pertanggungjawaban APBD (100%)	100	38.612.700	100	37.102.400	100,00%	96,09%
Pembahasan KUA dan PPAS	Tersedianya bahan pembahasan KUA dan PPAS (Buku)	40	8.025.400	40	7.969.200	100,00%	99,30%
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersedianya bahan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Buku)	40	6.083.500	40	6.061.800	100,00%	99,64%
Pembahasan APBD	Tersedianya Bahan Pembahasan APBD (Buku)	40	6.825.200	40	6.114.400	100,00%	89,59%
Pembahasan APBD Perubahan	Tersedianya Bahan Pembahasan APBD Perubahan (Buku)	40	6.203.600	40	6.091.800	100,00%	98,20%
Pembahasan Laporan Semester	Tersedianya Bahan Laporan Semesteran Untuk Pembahasan (Buku)	40	1.858.100	40	1.804.200	100,00%	97,10%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tersedianya Bahan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban APBD (Eks dan buku)	180	9.616.900	180	9.061.000	100,00%	94,22%
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentasi pemenuhan Terasilitasinya Fungsi Pengawasan DPRD (100%)	100	228.957.100	56	13.836.400	56,40%	6,04%
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terasilitasinya Fungsi Pengawasan DPRD Bidang Pemerintahan dan Hukum (Kecamatan)	11	45.137.700	4	2.942.300	36,36%	6,52%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terasilitasinya Fungsi Pengawasan DPRD Bidang Infrastruktur (Kecamatan)	11	45.172.800	2	2.934.000	18,18%	6,50%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terasilitasinya Fungsi Pengawasan DPRD Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kecamatan)	11	44.702.900	2	2.479.900	18,18%	5,55%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terfasilitasinya Fungsi Pengawasan DPRD Bidang Perekonomian (Kecamatan)	11	44.702.900	2	2.320.200	18,18%	5,19%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terfasilitasinya Fungsi Pengawasan DPRD Bidang Sumber Daya Alam (Kecamatan)	11	44.702.900	-	-	0,00%	0,00%
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Tersedianya Bahan Hasil Pemeriksaan (Eksemplar)	100	3.160.400	100	3.160.000	100,00%	99,99%
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Tersedianya bahan untuk pengawasan Anggaran (Eksemplar)	40	1.377.500	-	-	0,00%	0,00%
Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentasi pemenuhan a kualitas Kinerja DPRD secara Profesional dan Terukur yang mewakili Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut (100%)	100	3.369.393.340	74	1.558.009.442	73,64%	46,24%
Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya Kegiatan Bimtek DPRD (Kali)	140	1.834.290.360	57	480.162.487	40,71%	26,18%
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Tahun)	12	567.723.500	12	452.780.500	100,00%	79,75%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terbayarnya Honor Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD (Tahun)	12	496.249.500	12	252.174.300	100,00%	50,82%
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terbayarnya Tenaga Ahli Fraksi DPRD ,Terpenuhinya Tenaga Ahli Fraksi DPRD (Tahun/Orang)	96	299.637.670	96	219.670.755	100,00%	73,31%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terpenuhinya bahan pendukung kegiatan penyelenggaraan Humas DPRD untuk menunjang Kinerja DPRD (Jenis)	15	167.964.390	15	152.721.400	100,00%	90,92%
Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersedianya dokumen Program Kerja DPRD (Buku)	40	3.527.920	-	500.000	0,00%	14,17%
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentasi pemenuhan Proses dan Mekanisme Penjaringan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut melalui Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut (100%)	100	1.573.020.010	100	644.133.200	99,99%	40,95%
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terfasilitasinya Kunjungan Kerja DPRD ke Dalam Daerah (Kecamatan)	11	155.340.000	11	3.515.000	100,00%	2,26%
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Dokumen Pokir DPRD (Buku)	50	6.558.700	50	6.505.100	100,00%	99,18%
Pelaksanaan Reses	Terfasilitasinya Kegiatan Reses Anggota DPRD (Kali)	3	1.411.121.310	3	634.113.100	100,00%	44,94%
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentasi pemenuhan Pengawasan Kode Etik DPRD (100%)	100	960.700	100	426.000	100,00%	44,34%
Pengawasan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Dokumen Badan Pengawasan Kode Etik DPRD (Eksemplar)	15	960.700	15	426.000	100,00%	44,34%
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Prosentasi pemenuhan publikasi bahan dan dokumentasi hasil pembahasan untuk menunjang fungsi dan tugas DPRD (100%)	100	142.397.720	100	85.187.000	100,00%	59,82%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Terfasilitasinya Pengharmonisasian Raperda berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2019 (Tahun)	0	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Terpenuhinya bahan komunikasi dan Publikasi Dewan (Tahun)	12	142.397.720	12	85.187.000	100,00%	59,82%
Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya tugas pokok dan Fungsi DPRD (100%)	100	18.462.180.400	100	8.094.772.256	99,95%	43,85%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi untuk menunjang kinerja DPRD (Tahun)	12	18.460.820.400	12	8.094.772.256	100,00%	43,85%
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunya Laporan Kinerja DPRD (Buku)	44	1.360.000	44	-	100,00%	0,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		77,20%	40,39%
				Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Rendah
Rp. 69.248.368.264				Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program		89,51%	65,23%
				Predikat Kinerja Dari Seluruh Program		Tinggi	Sedang

Permasalahan – permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut antara lain :

- 1) Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dengan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan.
- 2) Banyak kegiatan yang masih terfocus dilaksanakan di akhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran.
- 3) Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD ikut mewarnai kelancaran dalam pengambilan keputusan-keputusan.
- 4) Sarana dan prasarana pendukung (ruang sidang, ruang rapat, tempat kerja) yang mengalami permasalahan akibat usia bangunan.

Sedangkan solusi terhadap permasalahan diatas dapat diusulkan sebagai berikut :

- 1) Perlu terus ditingkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta sumber daya manusia Sekretariat DPRD, hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi terhadap bidang tugas baik DPRD maupun Sekretariat DPRD. Misalnya melalui kegiatan diklat, work shop, bimtek, seminar, lokakarya, kunjungan kerja atau pembelajaran, dll.
- 2) Mengupayakan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme anggaran yang telah ditetapkan.
- 3) Mensinergikan dengan tepat antara kepentingan DPRD dengan pihak eksekutif dalam proses pengambilan keputusan-keputusan DPRD.
- 4) Perlu dilakukan pemeliharaan yang intensif agar sarana pendukung dapat berfungsi dengan baik.

BAB IV.
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Bab IV (CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan Urusan/kegiatan dimaksud.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021. Pencapaian kinerja program dan kegiatan merupakan informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui Laporan ini.

Dari uraian pelaksanaan kegiatan tahun 2021 secara umum program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaan masih ada kendala atau masalah yang dihadapi sehingga pencapaian tujuan kurang maksimal.

Demikian laporan Pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 ini disampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama satu tahun dan bisa menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja, diharapkan laporan ini bisa menjadi landasan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis berikutnya. Terimakasih.

Pelaihari, 18 Januari 2022

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT**



LUFFIATI UYUN, M. Pd
NIP. 19620622 198702 2 002